

## BAB II

### CITRA JEPANG DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana JENESYS menjadi alat penyebaran *soft power* Jepang, terutama di Indonesia. Suatu negara menyebar *soft power*-nya dengan tujuan untuk meningkatkan citra positif dan menyebarkan pengaruhnya. Dengan menjadi alat penyebaran *soft power*, JENESYS adalah alat untuk meningkatkan pengaruh positif Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti bagaimana JENESYS menjadi alat *soft power* Jepang berarti meneliti apakah JENESYS memiliki peran dalam meningkatkan *soft power* Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui citra Jepang di Indonesia sebelum JENESYS dilaksanakan.

Bagian kedua dari tulisan ini akan menguraikan citra Jepang beserta peristiwa sejarah yang menyebabkannya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan yang timbul antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya program JENESYS.

#### 2.1 Jepang Sebagai Penjajah

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Jepang masuk ke republik ini. Setelah mulai menduduki Cina pada tahun 1937, tahun 1941, Jepang mendarat di Semenanjung Malaya (Allinson, 1997). Mulai saat itu, Jepang menjajah Indonesia hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ketika Jepang mendarat, penduduk Indonesia menyambut dengan gembira, berpikiran bahwa saudara mereka, sesama orang Asia datang untung membantu mereka lepas dari penjajahan Belanda. Akan tetapi, kenyataannya, masuknya Jepang adalah masuknya kekejaman lain di tanah air ini (Nurbaiti, 2010).

Jepang ingin mengeksploitasi bahan-bahan mentah di Indonesia, dan menjadikannya koloni Jepang (Wertheim, 1959). Tujuan utama Jepang adalah “*to make the population participate in the war effort, consequently, the popular leaders were soon called to prominent posts without, however, being allowed to carry on nationalist propaganda*” (Wertheim, 1959, 77). Meskipun demikian, Jepang juga telah memberikan kontribusi pada kemerdekaan Indonesia, karena

telah memberikan kesempatan pada Sukarno dkk untuk membentuk berbagai organisasi untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia.

Oleh Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga bagian: Sumatra, Jawa dan Madura, Kalimantan dan Indonesia Timur (Ricklefs, 2001). Ketiga wilayah ini berada di bawah komando yang berbeda, sehingga memiliki kebijakan yang berbeda pula. Sumatera ditempatkan di bawah komando Angkatan Darat ke-25, dan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16. Kedua wilayah ini berada di bawah kendali Angkatan Darat ke-7 yang bermarkas besar di Singapura. Kalimantan dan Indonesia bagian Timur dikuasai oleh angkatan laut.

Ricklefs menyebutkan, pulau Jawa:

dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama adalah manusia. Kebijakan-kebijakan Jepang di sana membangkitkan rasa kesadaran nasional yang jauh lebih mantap daripada di kedua wilayah lainnya, dan dengan demikian semakin memperbesar perbedaan tingkat kecanggihan politik antara Jawa dan daerah-daerah lainnya. Dikarenakan pentingnya arti perkembangan-perkembangan itu bagi masa yang akan datang, maka Jawa juga mendapatkan perhatian ilmiah yang lebih besar daripada pulau-pulau lainnya. (2001, 406).

Pulau Jawa dianggap jauh lebih penting daripada wilayah lainnya di Indonesia. Wilayah Sumatera berarti karena sumber-sumber strategisnya. Di wilayah ini, Jepang baru mengembangkan ide-ide nasionalis setelah Jepang berada di ambang kekalahan. Wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut tidak dipandang penting oleh Jepang, dari segi politik ataupun ekonomi, sehingga wilayah ini tidak diberi perhatian khusus. Pemerintahan di wilayah ini bersifat sangat menindas.

Jepang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyapu bersih pasukan-pasukan Belanda dan Sekutu serta mengambil alih pemerintahan. Kekuatan militer Belanda telah tumbang, hanya tersisa sedikit gerombolan tentara di beberapa daerah terpencil. Kebanyakan rakyat Indonesia tidak memberi bantuan pada mereka, bahkan ada beberapa yang menyerang serdadu dan warga sipil Belanda, sehingga satu-satunya cara adalah menyerah ke Jepang. "Jepang berniat menahan semua orang Eropa (kecuali warga negara sekutu-sekutu Jepang, terutama orang-orang Jerman), tetapi dalam beberapa hal keahlian mereka dibutuhkan untuk menjaga agar industri-industri tetap berjalan." (Ricklefs, 2001,

406). Jepang memerlukan satu tahun untuk bisa menangkap semua orang Eropa. Kondisi di kamp-kamp tawanan sangat buruk. “Kurang lebih 20% dari tawanan militer Belanda, 13% dari warga sipil wanita, dan 10% dari anak-anak meninggal dunia” (Ricklefs, 2001, 406). Jumlah tertinggi korban yang meninggal dunia terdapat di kamp sipil pria, yaitu 40%.

Masalah yang dihadapi pemerintah Jepang tidak hanya orang-orang Eropa yang masih berada di Indonesia, tetapi juga gerakan-gerakan revolusi dari warga Indonesia.

Serangan-serangan terhadap orang-orang Eropa dan perampokan terhadap rumah-rumah mereka di Banten, Cirebon, Surakarta, dan banyak kota kecil lainnya di Jawa tampak akan menjurus ke suatu gelombang revolusi. Di beberapa daerah, tindakan-tindakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam setempat. Orang-orang Eropa dan harta mereka, toko-toko dan para pedagang Cina, dan, di beberapa tempat, orang Jawa Kristen menjadi sasaran kekerasan dan, terkadang, pembunuhan. Begitu pula, di Aceh dan di Sumatera Barat dan Timur, ketegangan penduduk asli yang berasal dari zaman penjajahan Belanda mulai meletus dalam tindak kekerasan (Ricklefs, 2001, 407).

Revolusi-revolusi ini tidak diperkirakan Jepang sebelumnya. Jepang sedang menghadapi perang, sehingga gerakan-gerakan revolusi semacam ini tidak termasuk prioritas mereka. Jepang mengatasinya satu persatu: segera turun tangan jika ada pemberontakan. Mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung pada penguasa-penguasa lokal yang lebih berpengalaman untuk mengendalikan rakyatnya, seperti yang telah dilakukan Belanda. Meskipun mereka telah melakukan berbagai propaganda untuk memperlihatkan bahwa mereka mau bekerja sama dengan Islam, Jepang sadar bahwa tetap ada kemungkinan kelompok yang menolak Belanda juga akan menolaknya. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk membuat citra baik, dengan memberi para pemimpin Islam kesempatan-kesempatan yang tidak pernah diberikan oleh Belanda.

Tujuan utama Jepang adalah “menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi mendominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara” (Ricklefs, 2001, 408), karena tujuan besarnya adalah “membentuk suatu ‘Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya’” (Ricklefs, 2001, 405). Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Jepang membuat

peraturan-peraturan baru yang mengendalikan dan mengatur hasil utama Indonesia serta putusnya hubungan dengan pasar ekspor tradisional. Peraturan-peraturan ini telah menimbulkan banyak kekacauan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.

“Jepang tidak dapat menampung semua hasil ekspor Indonesia, dan kapal-kapal selam sekutu segera menimbulkan begitu banyak kerugian terhadap pelayaran Jepang sehingga komoditi-komoditi yang diperlukan Jepang pun tidak dapat dikapalkan dengan jumlah yang memadai” (Ricklefs, 2001, 408). Pada masa itu, produksi tebu yang menjadi pendapatan pokok di wilayah Jawa Tengah dan Timur menurun, sehingga pendapatan buruh upah yang tidak memiliki tanah juga menurun. Perkebunan tebu diambil alih Jepang pada bulan Agustus 1943. Perkebunan tembakau yang luas di Sumatera Timur diubah untuk produksi pangan.

Pemerintahan militer Jepang juga mengubah mata uang dengan menggunakan mata uang pendudukan. Hal ini mendorong meningkatkan inflasi, terutama mulai tahun 1943 hingga seterusnya, dan mengakibatkan penderitaan besar pada penduduk Indonesia.

Pada pertengahan tahun 1945, mata uang ini bernilai sekitar 2,5 persen dari nilai nominalnya. Pengaturan pangan dan tenaga kerja secara paksa, gangguan transportasi dan kekacauan umum telah mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama pada tahun 1944 dan 1945. Angka kematian meningkat dan kesuburan menurun; sepanjang yang diketahui, pendudukan Jepang adalah satu-satunya periode dalam dua abad di mana jumlah penduduk tidak meningkat secara berarti. Seperti wilayah-wilayah pendudukan lainnya, Indonesia menjadi suatu negeri yang tingkat penderitaan, inflasi, ketekoran, pencatutan, korupsi, pasar gelap, dan kematian sangat ekstrem (Ricklefs, 2001, 409).

Ricklefs menyebutkan, ada dua prioritas kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia: “menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang” (2001, 409). Seperti Belanda, Jepang ingin menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi banyak masalah yang juga dihadapi Belanda, dan mereka mengatasinya dengan cara yang sama dengan Belanda. Jepang juga masih menggunakan hukum Belanda, meskipun telah menghilangkan beberapa bagian yang bertentangan dengan hukum militer Jepang. Karena masih terlibat perang,

Jepang memutuskan untuk berkuasa melalui mobilisasi (khususnya di pulau Jawa dan Sumatera) daripada memaksakan suatu ketenangan yang tertib. Akan tetapi, usaha mobilisasi ini malah meletakkan dasar-dasar revolusi pada rakyat Indonesia. Ketika itu, Jepang mengalami banyak kekalahan militer akibat gagalnya serangannya, dan menderita banyak kerugian. Terlebih lagi, mulai tahun 1943, Amerika berubah haluan, menjadi lawan Jepang di wilayah Pasifik. Oleh karena itu, kebijakan Jepang di Indonesia berkembang dalam konteks militer yang terus menerus memburuk.

Jepang berusaha menghilangkan pengaruh Barat di Indonesia dengan melarang pemakaian bahasa Belanda dan Inggris, serta mendorong dipakainya bahasa Jepang. Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris membuat mustahil pendidikan yang lebih tinggi. Kalender Jepang digunakan untuk tujuan resmi, patung-patung Eropa dihancurkan, jalan-jalan diberi nama baru, bahkan Batavia dikembalikan menjadi Jakarta kembali (Ricklefs, 2001).

Jepang menggalakkan kampanye propaganda untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang adalah “saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk suatu tatanan baru di Asia” (Ricklefs, 2001, 410). Untuk membantunya, Jepang mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk mengimplementasikan tujuan propagandanya, khususnya guru, seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang terkenal anti-Belanda. Upaya propaganda ini sering gagal, karena adanya “kekacauan ekonomi, teror Polisi Militer (Kenpeitai), kerja paksa, penyerahan wajib beras, kesombongan dan kekejaman orang-orang Jepang pada umumnya, pemukulan dan pemerkosaan, serta kewajiban memberi hormat kepada setiap orang Jepang” (Ricklefs, 2001, 410).

Jepang dikenal bangsa Indonesia sebagai penjajah yang kejam. Jika terjadi kesalahan, maka orang Indonesia akan ditampar. Salah seorang sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, menyebutkan ini mungkin adalah bentuk pendidikan disiplin Jepang untuk orang Indonesia, tetapi karena orang Indonesia tidak terbiasa, maka Jepang disebut kejam (2010). Namun, karena dilarangnya penggunaan bahasa Barat, dan sedikitnya orang yang mengerti bahasa Jepang, bahasa Indonesia menjadi saran utama propaganda. Dengan demikian, bahasa Indonesia semakin kokoh menjadi bahasa persatuan.

Untuk membantu Jepang mengatur Indonesia, dipekerjakanlah pejabat baru dan juga pemimpin-pemimpin politik, untuk memudahkan dalam memobilisasi rakyat. Bulan Maret 1942, semua organisasi politik dihapuskan. Kegiatan politik dilarang dan organisasi politik dibubarkan dan digantikan oleh organisasi bentukan Jepang. Walaupun begitu, Islam dipandang sebagai jalan utama untuk melakukan mobilisasi, sehingga pada akhir Maret 1942, Jepang mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama).

Pada April 1942, Jepang mendirikan Gerakan Tiga A, yang namanya berasal dari slogan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Gerakan ini didirikan untuk mendukung propaganda Jepang. Dalam gerakan tersebut, pada bulan Juli, didirikan sebuah subseksi Islam yang diberi nama Persiapan Persatuan Umat Islam di bawah pimpinan Abikoeno Tjokrosoejoso. Akan tetapi, Gerakan Tiga A tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya, karena pejabat Indonesia hanya memberi sedikit dukungan. Propaganda yang dilakukan dengan keras juga tidak ditanggapi serius oleh orang Indonesia.

Setelah Hatta dan Sjahrir kembali ke Indonesia, Sukarno bergabung dengan mereka dan mendesak Jepang untuk mendirikan organisasi politik dibawah pimpinan mereka. Amir Sjarifuddin bertindak lebih berani dengan menerima bantuan dari Belanda untuk mendirikan gerakan perlawanan anti-Jepang. Akan tetapi, gerakan ini ditembus Jepang dan Amir serta 53 orang lainnya ditangkap. Beberapa pembantu Amir dihukum mati, tetapi hukuman Amir diperingan menjadi seumur hidup karena adanya permintaan dari Sukarno dan Hatta. “Pihak Jepang tidak berani melukai perasaan elit intelektual di Jawa yang sedikit sekali jumlahnya dengan menghukum mati salah seorang anggotanya yang terkemuka” (Ricklefs, 2001, 413).

Perlawanan tidak hanya terjadi di pulau Jawa yang terdepan dalam bidang politik, tetapi juga di luar Jawa. Pemberontakan dipimpin oleh seorang ulama muda di Aceh, di Kalimantan Barat dan Selatan, pihak Jepang mencurigai ada kelompok-kelompok perlawanan. Kelompok-kelompok ini dihancurkan melalui penangkapan di Kalimantan Selatan pada bulan Juli 1943 dan awal 1944.

Meskipun tidak ada perlawanan yang mengancam kekuasaan Jepang, semuanya berakibat buruk (Ricklefs, 2001).

Dengan terhentinya kemajuan militer, mobilisasi rakyat di wilayah-wilayah pendudukan harus diberi prioritas. Oleh karena itu, Kolonel Horie Choso, Kepala Kantor Urusan Agama, mengadakan pertemuan dengan para kyai untuk mendukung mobilisasi dan mengindoktrinasi para pemuda. Pada Desember 1942, Horie mengatur agar 32 orang kyai diterima di Jakarta oleh Gunseikan, gubernur militer. Kehormatan semacam ini tidak pernah diterima pada zaman Belanda. Pihak Jepang kini menemukan saluran bagi mobilisasi. Pada bulan Desember, mereka menjanjikan pada rakyat Jakarta kan mendirikan sebuah partai politik.

Awal tahun 1943, pihak Jepang mulai mengerahkan usaha untuk mobilisasi. Gerakan pemuda yang baru harus diberi prioritas tinggi dan ditempatkan di bawah pengawasan ketat pihak Jepang. Jepang membentuk organisasi-organisasi pemuda, seperti Korps Pemuda (Seinendan), Korps Kewaspadaan (Keibodan), Heiho (Pasukan Pembantu). Pada akhir perang, sekitar 25.000 pemuda Indonesia berada dalam Heiho, tempat mereka mendapat latihan dasar yang sama dengan para serdadu Jepang. "Pada semua organisasi itu terdapat indoktrinasi yang intensif dan disiplin yang keras. Konon, lebih dari dua juta pemuda Indonesia berada dalam organisasi-organisasi semacam itu pada akhir perang, kira-kira 60% di antaranya dalam Keibodan. Pada Maret 1943, Gerakan Tiga A dihapuskan dan digantikan oleh Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Akan tetapi, organisasi baru ini hanya mendapat sedikit dukungan, karena pihak Jepang tetap tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang potensial menjadi pemberontakan. Putera tidak diberi kekuasaan apa pun atas gerakan-gerakan pemuda (Ricklefs, 2001).

Pihak Jepang mencoba untuk membuat para guru Islam tradisional pedesaan sebagai mata rantai utama mereka dengan rakyat Jawa. Jepang memiliki tiga permintaan: (1) membungkuk untuk menghormati Kaisar di Tokyo, (2) menjadikan Perang Dunia II dinyatakan sebagai Perang Sabil, (3) Tidak dipakainya bahasa Arab. Semua permintaan tersebut ditolak, alasan karena umat Islam hanya sembahyang menghadap ke Mekah, dan hanya tunduk hanya kepada Tuhan. Alasan kedua adalah karena orang-orang Jepang tidak menganut Islam,

yang disebut kafir oleh orang Islam, sehingga perang tersebut tidak dapat disebut Perang Sabil. Alasan ketiga ditolak dengan kompensasi diajarkannya bahasa Jepang juga diajarkan di sekolah-sekolah Islam dan diterimanya kurikulum Jepang di pelajaran-pelajaran non-agama (Ricklefs, 2001).

Keadaan di pedesaan berbeda dengan di kota. Para kyai di wilayah pedesaan Jawa yang lebih sederhana tampak lebih menyetujui rencana-rencana pihak Jepang daripada kyai modern di kota. Kombinasi disiplin fisik, militer, dan rohani orang-orang Jepang menyentuh perasaan yang responsif di kalangan masyarakat pesantren. Banyak kyai pedesaan yang diberi beasiswa ke Jakarta untuk mengikuti berbagai pelatihan. Dalam pelatihan tersebut terdapat ceramah tentang masalah-masalah agama, juga indoktrinasi dengan propaganda Jepang.

Dukungan Indonesia terhadap perang semakin memburuk. Oleh karena itu, Jepang mulai menjanjikan keterlibatan beberapa orang Indonesia dalam urusan-urusan pemerintahan di Jawa. Jepang memberikan kemerdekaan semu pada Birma dan Filipina pada Agustus dan Oktober 1943. Jawa dianggap belum siap memperoleh kemerdekaan, tetapi beberapa dewan dibentuk untuk memberi kesan adanya partisipasi dari orang Indonesia sendiri. Semakin banyak orang Indonesia yang menjadi penasihat pemerintah Jepang, meskipun tidak terlalu berperan. Di Sumatra, keterlibatan rakyat lebih kurang berarti lagi. Di daerah kekuasaan angkatan laut, hanya ada sedikit melakukan langkah-langkah untuk melibatkan rakyat Indonesia, selain memperkenankan adanya beberapa konsultasi dalam pemerintahan kotapraja (Ricklefs, 2001).

Jepang juga melibatkan banyak rakyat Indonesia dalam *romusha*. Paling sedikit ada 200.000 orang terlibat, bahkan mungkin setengah juta orang, dengan tidak lebih dari 70.000 orang dapat ditemukan dalam keadaan hidup pada akhir perang. Keluarga mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Jepang memberlakukan peraturan-peraturan seperti kewajiban penjualan beras dengan harga rendah kepada pemerintah, yang sebenarnya merupakan sistem penyerahan wajib guna memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Rakyat amat membenci para pejabat Indonesia yang harus mengerahkan *romusha* dan penyerahan beras wajib.



Pada akhir bulan Oktober 1943, Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air), yang merupakan tentara sukarela Indonesia. Berbeda dengan Heiho, Peta tidak menjadi bagian tentara Jepang secara resmi, melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak Sekutu. Perwira PETA terdiri dari pejabat, guru, kyai, dan orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi serdadu kolonial Belanda, termasuk Soedirman. Disiplin PETA sangat ketat dan ide-ide nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi.

Pada Januari 1944, Putera digantikan oleh organisasi baru untuk memobilisasi penduduk Jawa: Jawa *Hokokai* (persatuan kebaktian Jawa). Sukarno dan Hatta menduduki tempat penting dalam kepengurusannya. Namun, pihak Jepang tidak sendirian dalam mengambil keuntungan dalam keadaan ini. Para pemimpin Indonesia juga memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan dari Jepang. Sukarno memanfaatkan tamasya propaganda *Hokokai* untuk mendapat dukungan sebagai pemimpin utama kekuatan rakyat. *Hokokai* membentuk organisasi untuk menembus desa-desa: Rukun Tetangga (*Tonari Gumi*), dengan tujuan “untuk mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh sampai dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi, dan pelaporan” (Ricklefs, 2001, 420). Bahkan kepala desa pun diberi kursus untuk melancarkan indoktrinasi.

Jepang mulai menyadari bahwa mereka kalah perang dan kehilangan kendali atas kekuatan rakyat yang telah mereka bangkitkan. Pada Februari 1944, terjadi perlawanan serius pertama kaum tani di Jawa terhadap kewajiban menyerahkan beras. Pemberontakan ini ditumpas dengan kejam. Berbagai pemberontakan dan protes-protes kaum tani terjadi di Jawa Barat. Jepang akhirnya mendirikan Kantor Urusan Agama di desa-desa untuk membantunya mengendalikan kelompok Islam pedesaan. Pemuda-pemuda di kota besar sudah memulai gerakan bawah tanah mereka, dan mulai menyusun rencana kemerdekaan dari kekalahan yang mengancam Jepang.

Pada Februari 1944, pasukan Jepang diusir dari Kepulauan Marshall oleh pasukan-pasukan Amerika, dan bulan Juli Jepang dijatuhkan bom B-29. Pada bulan yang sama, angkatan laut Jepang dilumpuhkan di Laut Filipina, dan Jepang

kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Saipan, Kepulauan Mariana. Kekalahan ini menimbulkan krisis kabinet di Jepang. Jenderal Tojo Hideki, Perdana Menteri Jepang, mengundurkan diri dan digantikan oleh Jenderal Koiso Kuniaki, yang cenderung ingin memberikan kemerdekaan semu pada Indonesia.

Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, tanpa menyebutkan tanggal pasti, dan mengharapkan Indonesia mendukung Jepang sebagai tanda terima kasih. Angkatan Darat ke-16 diinstruksikan untuk mendorong kekuatan-kekuatan nasionalis, dan bendera Indonesia boleh dikibarkan di kantor-kantor Jawa *Hokokai*.

Meskipun angkatan laut Jepang menentang penggerakan nasionalisme Indonesia, seorang perwiranya di Jakarta justru amat mendukung semua itu. Laksamana Madya Maeda banyak membantu Sukarno dan Hatta dengan menggunakan dana angkatan laut. “Maeda menjadi orang kepercayaan banyak orang Indonesia terkemuka dari berbagai tingkat usia, dan memberikan andil pada proses yang menjadikan para pemimpin dari generasi muda dan tua saling mengenal dan memahami (jika tidak saling menghormati) satu sama lain di Jakarta” (Ricklefs, 2001, 422).

Kelompok-kelompok pemuda dan militer baru banyak dibentuk. Jawa *Hokokai* diberikan organisasi pemuda sendiri, Barisan Pelopor, yang awalnya ditujukan untuk menyiarkan propaganda, tetapi malah mengadakan latihan gerilya. Sebuah organisasi militer lain, Barisan Hizbullah, juga diperbolehkan untuk didirikan dibawah Masyumi. Semakin banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Ada yang diangkat menjadi wakil residen, dibentuknya Dewan Penasihat dan Dewan Penasihat Pusat. Meskipun semuanya diikuti kursus indoktrinasi, pengalaman ini mendorong pemikiran nasionalis mereka dan meningkatkan ketidaksukaan terhadap Jepang karena mengharuskan mereka melakukan hal-hal yang mereka anggap merendahkan derajat.

Jepang akhirnya harus memenuhi janji kemerdekaan karena runtuhnya posisi militer mereka berlangsung dengan cepat. Dengan banyak kekalahan di berbagai daerah di Indonesia, Jepang menyadari bahwa mereka terancam kehilangan kekuasaan, dan memutuskan untuk menghapuskan kekangan-

kekangan yang masih ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia. Akhirnya pada bulan Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan harapan, jika kemerdekaan terwujud, kemerdekaan berada di tangan para pemimpin dari generasi tua yang lebih mudah diajak bekerja sama daripada generasi muda yang sulit diterka.

Pada bulan Juli 1945, semua unsur di kalangan Jepang sepakat bahwa kemerdekaan harus diberikan kepada Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Setelah Okinawa jatuh di bulan Juni, pengeboman besar-besaran pada Jepang dimulai. Pada akhir bulan Juli, Sekutu menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Tujuan Jepang di Indonesia kini adalah membentuk sebuah negara yang merdeka untuk mencegah kembali berkuasanya Belanda, musuh mereka. Mereka memutuskan bahwa Jawa akan diberi kemerdekaan pada awal bulan September, dan daerah-daerah lain akan menyusul. Pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Uni Soviet mengumumkan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus. Esoknya, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan Soviet menyerbu Manchuria.

Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, dan Indonesia dihadapkan pada kekosongan politik: Jepang masih berkuasa namun telah menyerah, dan Sekutu belum hadir untuk menggantikan Jepang. Setelah peristiwa Rengasdengklok, pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar rumah Sukarno.

Menurut Ricklefs, “zaman Jepang telah menciptakan kondisi yang kacau, telah begitu mempolitisasi rakyat, dan telah mendorong para pemimpin dari generasi tua maupun muda untuk mengambil prakarsa, sedemikian rupa sehingga pihak Sekutu menghadapi suatu perang kemerdekaan revolusioner” (2001, 428). Wertheim mengambil kesimpulan bahwa zaman penjajahan Jepang ini telah membuat ekonomi Indonesia “*more and more subservient of the rice surplus and other crops, leading to a complete disintegration of economic life. Indonesia manpower was also exploited by the Japanese to the utmost, not only for the construction of roads and military works, but also to reinforce their military strength*” (1959, 77-78).

Dari sejarah penjajahan Jepang, terlihat bagaimana Jepang telah bersikap kejam pada Indonesia dengan mengeruk kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung keperluannya dalam Perang Dunia II. Jepang memobilisasi penduduk sebagai tentara cadangan, dan mendoktrinasi orang Indonesia untuk membantunya dalam perang. Prajurit-prajurit yang tergabung dalam *romusha* ini dipaksa untuk meninggalkan keluarganya, yang dibiarkan dalam kondisi yang menyedihkan, hanya untuk mati di medan perang. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat bertahan hidup hingga perang berakhir. Jepang juga memanfaatkan orang Indonesia untuk menanam padi dan menyerahkannya ke pemerintah kolonial Jepang dengan harga yang murah. Semua hal ini membuat orang-orang Jepang memiliki citra kejam di mata orang Indonesia, meskipun Jepang juga dapat dikatakan telah memicu dan mendorong pergerakan nasionalisme di Indonesia, walaupun pada awalnya Jepang hanya berniat untuk melakukan propaganda dan mobilisasi. Indonesia juga terpengaruh dengan paham anti-demokrasi dan anti-Barat, walaupun pemerintahan Jepang yang menyebarkannya juga ditentang oleh rakyat (Wertheim, 1959).

Dari zaman penjajahan ini jugalah terlihat citra sifat-sifat orang Jepang yang disiplin. Dalam pelatihan tentaranya, Jepang melatih orang-orang Indonesia dengan disiplin tinggi, bahkan karena ingin melatih orang Indonesia lebih disiplin, orang Jepang sering dianggap kejam.

## **2.2 Jepang dan *Jugun Ianfu***

*Jugun ianfu* atau *comfort women* adalah “perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu 1942-1945” (Prasetyaju, 2010). Perempuan-perempuan ini dibawa ke kem untuk melayani para prajurit. Prasetyaju (2010) juga menyebutkan mereka mereka juga dibawa ke medan perang untuk melayani kebutuhan seksual sipil maupun militer Jepang yang berada di garis pertempuran ataupun di belakangnya.

Menurut perkiraan, jumlah mereka saat perang mencapai 20.000-30.000 orang. Akan tetapi, Prasetyaju (2010) mengungkapkan, menurut pengakuan *jugun ianfu* yang masih hidup, jumlahnya lebih dari angka tersebut. Ikuhiko Hata,

seorang profesor di Nihon University, dalam Yomiuri Shimbun memperkirakan 40% *jugun ianfu* berasal dari Jepang, 30% berasal dari China dan negara lainnya, 20% berasal dari Korea. Akan tetapi, “*the total number of comfort women has yet to be determined exactly*” (Takagi et.al, 2007, 2). Takagi et.al menyebutkan, dalam laporan Radhika Coomaraswamy dari U.N. Commission on Human Rights tahun 1996, ada sekitar 200.000 *jugun ianfu* yang berasal dari Semenanjung Korea. Akan tetapi, laporan ini memiliki banyak kekurangan, dan ditolak oleh Menteri Luar Negeri Jepang waktu itu, Taro Aso. Menurut Aso, jumlah 200.000 “*lacking objective evidence*” (Takagi et.al, 2007, 2).

Fenomena ini tidak terliput media, padahal para perempuan ini tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Filipina, Taiwan, Timor Leste, dan Malaysia. Sebagian kecil juga berasal dari Belanda dan Jepang sendiri. Menurut Jenderal MacArthur dalam Regello, Jepang tidak mempublikasikannya untuk menghindari “*any bad press or public outcry back in the United States*” (2007, 1). Meskipun demikian, bukti-bukti mengenai keberadaan *jugun ianfu* ini sedikit demi sedikit terlihat dan dunia mulai menuntut kompensasi untuk para korban.

*Jugun ianfu* direkrut dengan cara halus dan kasar. Mereka yang direkrut dengan cara halus dijanjikan sekolah gratis, pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pekerja rumah tangga, dan pelayan rumah makan, tetapi ada juga yang diteror dengan disertai tindak kekerasan, diculik, bahkan diperkosa di depan keluarga mereka. Setelah direkrut, para perempuan ini diperkosa dan disiksa secara kejam. Mereka dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan. Jika ada yang hamil, maka akan diaborsi secara paksa. “Banyak perempuan mati karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati” (Prasetyaju, 2010, 3).

Menurut Takagi et.al, alasan perekrutan para perempuan ini adalah sebagai berikut.

- *to prevent military officers and soldiers from raping women and committing other sex crimes in occupied areas.*
- *to prevent venereal disease from spreading through troops who would otherwise contact local prostitutes who did not receive periodic medical checks.*

- to prevent military secrets from being leaked by limiting the women who provided sexual services to officers and soldiers to recruited comfort women. (Takagi, et.al, 2007, 2)

Pemerintah Jepang menyangkal bahwa militer Jepang telah merekrut perempuan dengan paksa. “On March 18, 1997, a Cabinet Secretariat official said in the Diet, ‘There is no evidence in public documents that clearly shows there were any forcible actions [in recruiting comfort women]’ (Takagi, et.al, 2007, 3. Penambahan oleh Takagi, et.al.). Namun, Chief Cabinet Secretary, Yohei Kono, mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai ‘Kono’s statement’, sebagai berikut:

*The recruitment of the comfort women was conducted mainly by private recruiters who acted in response to the request of the military. The government study has revealed that in many cases they were recruited against their own will, through coaxing, coercion, and so on, and that, at times, administrative and military personnel directly took part in the recruitment. (Takagi, et.al, 2007. 6).*

Deputy Chief Cabinet Secretary Nobuo Ishihara kemudian menjelaskan kalimat ini dengan mengatakan “As there were no documents to prove forcible recruitment, it was concluded, out of comprehensively made judgments based on the testimonies of [former] comfort women, that [recruitment] was forceful.” (2007, 6). Berdasarkan pernyataan Kono inilah, pada bulan Juli 1995, pemerintah Jepang mendirikan sebuah yayasan bernama Asian Women’s Fund (AWF). Hingga tahun 2007, yayasan ini telah memberikan kompensasi sebesar 1.3 miliar Yen pada 364 korban *jugun ianfu*. Korban juga dikirimkan surat permintaan maaf dari para perdana menteri berikutnya: Ryutaro Hashimoto, Keizo Obuchi, Yoshiro Mori, dan Junichiro Koizumi.

Pada tanggal 21 Maret 1997, Perdana Menteri Jepang menyampaikan surat pernyataan permohonan maaf Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia, dan pada tanggal 25 Maret 1997, disepakati dan ditandatangani MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang, melalui Departemen Sosial dan AWF. Inti MOU ini adalah Pemerintah dan Masyarakat Jepang koordinatif dan melaporkannya kepada Presiden RI. Meskipun demikian, pada tanggal 5 Oktober 2007, Perdana Menteri

Shinzo Abe tetap menyangkal keterlibatan pegawai pemerintah dalam perekrutan para korban *jugun ianfu*.

Prasetiaju (2010) tidak sependapat. Beliau menyebutkan bahwa Kaisar Hirohito-lah yang telah memberi restu pada sistem *jugun ianfu* ini untuk diterapkan di seluruh Asia Pasifik. Menurutnya, pelaksana di lapangan adalah pada petinggi militer yang diberi komando perang, sehingga sekarang pemerintah Jepang harus bertanggung jawab.

Sudah banyak korban *jugun ianfu* yang sudah meninggal. *Jugun ianfu* yang masih hidup rata-rata sudah berusia 80 tahun. Sebagian sudah memiliki keluarga, anak, cucu, hingga cicit. Ada juga yang tinggal sendiri dan mendapat bantuan dari keluarga dan tetangga. Upaya untuk melakukan penelitian untuk memperjelas sejarah *jugun ianfu* Indonesia masih terus dilakukan.

Fenomena *jugun ianfu* ini memperkuat citra Jepang sebagai negara yang kejam. Meskipun telah meminta maaf dan memberikan kompensasi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, Jepang tidak dapat menghapuskan masa lalu tersebut. Peristiwa penjajahan Jepang di tanah air ada di buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini membentuk cara pandang para siswa, tidak terkecuali para peserta JENESYS. Meskipun tidak timbul rasa dendam pada Jepang, citra Jepang sebagai negara penjajah dan kejam dapat terbentuk dalam diri para pemuda Indonesia.

### **2.3 Jepang Sebagai Sumber Dana**

Citra Jepang sebagai sumber dana investasi timbul pada masa setelah penjajahan dan Orde Baru. Pada masa ini, interaksi ekonomi menjadi bentuk hubungan utama antara kedua negara. Interaksi ekonomi ini berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan antar-pemerintah, tetapi juga melalui swasta (Bandoro, 1994).

Salah satu pilar utama dalam hubungan kedua negara adalah adanya kesamaan persepsi. Kedua negara sama-sama membutuhkan keamanan dan kestabilan kawasan Asia Pasifik. Jepang memerlukannya untuk keamanan negara, sedangkan Indonesia memerlukannya untuk membangun dan merealisasikan tujuan-tujuan nasional (Bandoro, 1994).

Setelah kemerdekaan, Jepang memiliki kewajiban untuk membayar pampasan perang pada Indonesia. Masalah pampasan perang ini telah menghambat hubungan diplomatik kedua negara. Hubungan diplomatik ini akhirnya resmi dibuka pada 15 April 1958, setelah melalui berbagai perundingan.

Jepang memiliki kepentingan di kawasan, yaitu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat yang penting untuk masa depan perekonomian Jepang. Tampaknya, diplomasi ekonomi negara matahari terbit ini tidak mengalami kesulitan di Indonesia, mengingat perilaku menyakitkan Jepang selama masa perang.

Pada pertengahan 1960-an, ada beberapa elit politik Indonesia yang mengkhawatirkan kekuatan ekonomi Jepang akan melakukan ekspansi. “Beberapa pemimpin Indonesia melihat Jepang sebagai negara yang lebih berbahaya karena kekuatan ekonominya. Banyak yang sepakat untuk mengatakan bahwa Jepang tidak hanya ingin menjadi kekuatan hegemoni di kawasan” (Bandoro, 1994, 100-101). Jepang ditakuti karena kemajuan teknologinya memungkinkannya untuk membangun kekuatan militer.

Namun, masih ada elit politik Indonesia yang berpandangan lain. Selain dipandang sebagai negara yang dapat menjadi ancaman, dan menduduki Indonesia kembali, Jepang juga dipandang sebagai sumber bantuan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Menurut Bandoro (1994), pendapat kedua ini lebih realistis, karena dikaitkan dengan usaha Indonesia untuk meningkatkan daya beli masyarakatnya.

Politik Indonesia waktu itu lebih diarahkan untuk mencari bantuan luar negeri untuk mencapai tujuan lebih besar, yaitu kestabilan ekonomi Indonesia. Prakarsa Jepang dalam membentuk konsorsium negara-negara donor untuk Indonesia (IGGI) menunjukkan bahwa Jepang adalah bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertemuan pertama IGGI juga dilaksanakan di Jepang.

Para ahli tidak dapat memungkiri bahwa Jepang adalah “sumber bantuan yang potensial bagi Indonesia” (Bandoro, 1994, 102). Indonesia waktu itu amat memerlukan bantuan luar negeri untuk kepentingan pembangunan. Karena Jepang memerlukan kestabilan lingkungan politik dalam negeri Indonesia, Jepang tidak



dapat mengabaikan kebijakan apa pun yang diambil oleh Indonesia apalagi jika hal itu menyangkut pembangunan nasional Indonesia (Bandoro, 1994). Oleh karena itu, jelas bahwa Jepang memiliki kepentingan juga di Indonesia. Citra Jepang sebagai negara yang perlu diwaspadai, selain karena faktor sejarah dan citra Jepang sebagai negara yang agresif, juga atas dasar adanya kecurigaan untuk membuat kekuatan tawar Indonesia menjadi terbatas.

Orang-orang Indonesia pada umumnya, ingatan penjajahan Jepang adalah faktor utama dalam menilai kerja sama Indonesia dengan Jepang. Akan tetapi, para pembuat kebijakan mencurigai Jepang berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan perundingan dengan Jepang. Oleh karena itu, segala perundingan Jepang dengan Indonesia, juga kawasan Asia Tenggara, akan tetap dicurigai oleh orang-orang Indonesia.

Peristiwa Malari pada tahun 1974, yang terjadi pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang waktu itu, Tanaka, sempat menghambat kerja sama perekonomian kedua negara, dan membuat keduanya introspeksi. “Jepang ... dipaksa untuk meninjau kembali peran ekonominya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mengambil hikmah dari peristiwa di Jakarta itu, dalam arti ia didorong untuk mengambil sikap lebih hati-hati terhadap setiap inisiatif ekonomi Jepang” (Bandoro, 1994, 95). Setelah peristiwa itu, hubungan kedua negara tetap berjalan baik. Hal ini didasari oleh keyakinan dan pengakuan akan potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Indonesia memerlukan dana dari Jepang, dan Jepang memerlukan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan pasar dari produk-produknya.

Peristiwa ini dapat dipahami sebagai hasil dari kecurigaan orang-orang Indonesia kepada motivasi Jepang dalam memberikan banyak bantuan. Setelah peristiwa ini, pemerintah Jepang mengevaluasi banyak kebijakannya, dan melancarkan banyak program untuk mempererat hubungan kedua negara. Indonesia juga menunjukkan minat untuk membina hubungan yang saling menuntungkan dengan Jepang. Diplomasi Indonesia waktu itu tidak hanya untuk kepentingan pembangunan semata, tetapi juga untuk pembangunan dan stabilitas kawasan.

Pandangan bahwa Jepang adalah ancaman mulai berkurang di pertengahan 1970-an. Usaha-usaha untuk mempererat hubungan kedua negara tetap dilakukan, dan analisis mengenai hubungan Indonesia-Jepang difokuskan pada hubungan ekonomi dan dagang. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyingkirkan rintangan-rintangan bagi produk Indonesia untuk masuk ke Jepang, dan Jepang meminta Indonesia untuk memperbaiki iklim investasinya. Pada tahap tertentu, hubungan luar negeri Indonesia dengan Jepang tetap berorientasi pada bidang ekonomi (Bandoro, 1994). Pada dasawarsa ini, terlihat bahwa Jepang adalah sumber dana luar negeri yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kecurigaan terhadap Jepang sudah mulai menghilang. Pada dasawarsa inilah, citra Jepang sebagai penjajah yang patut dicurigai mulai terkikis dan digantikan sebagai citra sebagai sumber dana untuk Indonesia.

Pada tahun 1980-an, hubungan kedua negara ini mengalami kemajuan. Dasawarsa ini diawali dengan penandatanganan perjanjian dengan Jepang. Namun, Bandoro menyebutkan ada kritik mengenai perdagangan Indonesia-Jepang yang bersifat asimetris dan pola investasi Jepang yang hanya ingin mencari bahan baku. Kritik tersebut mengatakan, pola seperti itu tidak dapat dipertahankan, dan hubungan Indonesia-Jepang perlu ditata kembali secara sistematis.

Permasalahan ini menjadi pembahasan yang cukup menonjol di tahun 1980-an ini, sehingga kedua negara merasa perlu untuk mengembangkan hubungan mereka ke bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, hubungan kedua negara pada dasawarsa ini berkembang dan semakin matang akibat meluasnya hubungan itu ke bidang-bidang lain selain ekonomi. Perluasan ini amat berarti bagi pertumbuhan kawasan Asia Tenggara.

Menurut Bandoro, perkembangan ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kawasan melalui dua jalur: jalur bilateral dan jalur institusi. Melalui jalur bilateral, “kebijakan Indonesia terhadap Jepang dapat disesuaikan dengan prioritas kebijakan-kebijakan ekonomi Jepang di kawasan” (Bandoro, 1994, 112). Indonesia berusaha untuk membuat kebijakan-kebijakan Jepang tidak hanya baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga untuk ekonomi kawasan. Jalur kedua, yaitu jalur institusi, Indonesia dapat melakukan

lobi-lobi melalui institusi yang memungkinkan kedua negara berdialog dengan terbuka sehingga dapat memahami kebutuhan masing-masing, juga dapat saling mengerti pentingnya peran kedua negara dalam kelangsungan kerja sama regional.

Namun, Indonesia tidak perlu memperlakukan Jepang secara khusus, dan Jepang pun tidak perlu memperlakukan Indonesia sebagai negara yang membutuhkan bantuannya. Hubungan kerja sama yang baik di antara kedua negara dapat mendorong mereka untuk meningkatkan interaksi dan memperkokoh kerja sama regional (Bandoro, 1994).

Bandoro menuliskan, dalam bidang politik dan keamanan, sebagai negara-negara yang terletak di kawasan politik yang sama, mereka harus lebih sering bekerja sama jika terjadi perubahan pada kawasan. Dengan demikian, akan timbul perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan sistem politik dan besarnya perbedaan kedudukan. Perbedaan tingkat kemajuan dapat menimbulkan perbedaan persepsi mengenai masalah-masalah regional, terutama ketika masalah tersebut menyangkut kepentingan regional kedua negara

Perbedaan kepentingan di kawasan Pasifik disebabkan oleh perbedaan posisi geografis. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, sehingga juga bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan kawasan. Jepang terletak di kawasan yang berbeda, yaitu kawasan Asia Timur. Negara-negara ASEAN berprinsip untuk mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjaga keamanan kawasan, sehingga posisi Jepang di kawasan lain telah membatasinya. Ketika Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin kawasan dalam menjaga keamanannya, Indonesia bekerja sama dengan Jepang dalam bentuk konsultasi politik mengenai perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan.

Hubungan Indonesia-Jepang pada masa setelah penjajahan hingga Orde Baru memperlihatkan perkembangan ke arah yang positif. Awalnya, citra Jepang pada rakyat dan pembuat kebijakan Indonesia adalah negara penjajah yang kejam yang akan mencari berbagai cara untuk kembali menguasai Indonesia. Citra ini masih bertahan hingga pertengahan 1970-an.

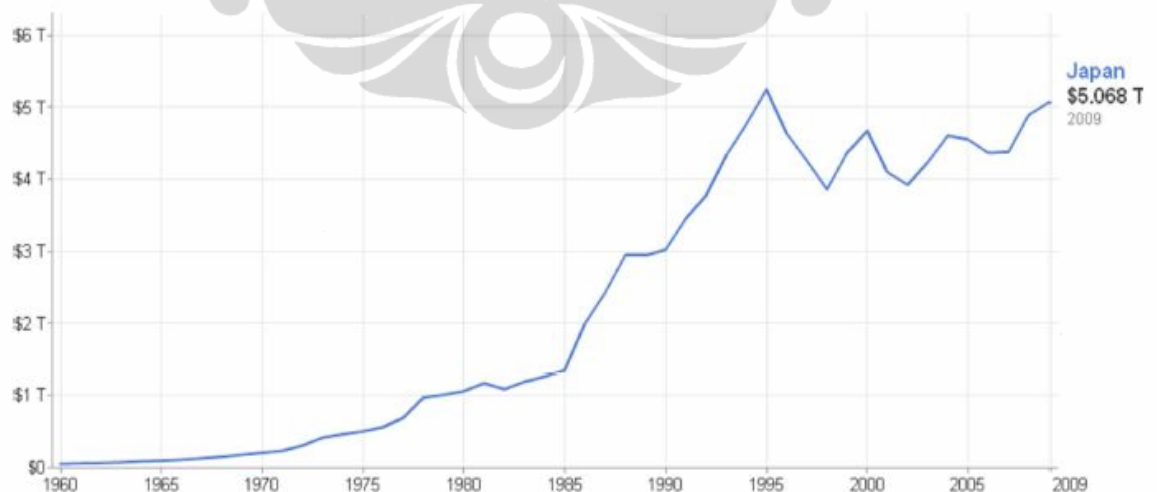
Akan tetapi, pandangan bahwa Jepang dapat berguna dari segi finansial juga sudah muncul, sebagai akibat berkembangnya hubungan Indonesia-Jepang

di bidang ekonomi. Waktu itu, Jepang memberikan banyak bantuan kepada Indonesia, selain dari pampasan perang. Hubungan ekonomi ini berkembang di 1980-an, dan mempertegas citra Jepang sebagai negara sumber dana dan mitra kerja sama ekonomi Indonesia. Pada dasawarsa ini, persepsi negatif pada Jepang mulai terkikis di beberapa kalangan tertentu. Akhirnya, Indonesia dan Jepang, seperti digambarkan Bandoro, menjadi mitra dalam pembangunan dalam negeri Indonesia, pembangunan kawasan, dan juga dalam menjaga kestabilan keamanan kawasan Asia Tenggara.

## 2.4 Jepang Sebagai Negara Maju

Setelah merdeka, Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang. Citra Jepang di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh sejarah bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia dan memperlakukan orang-orang Indonesia dengan kejam. Citra Jepang lainnya, yaitu sebagai negara maju dan memiliki teknologi tinggi, timbul akibat kemajuan Jepang yang disaksikan oleh dunia. Di tahun-tahun setelah Perang Dunia II, *“government-industry cooperation, a strong work ethic, mastery of high technology, and a comparatively small defense allocation (1%) of GDP helped Japan develop a technologically advanced economy”* (reportlinker.com).

**Grafik 2.1 Grafik Pertumbuhan GDP Jepang**



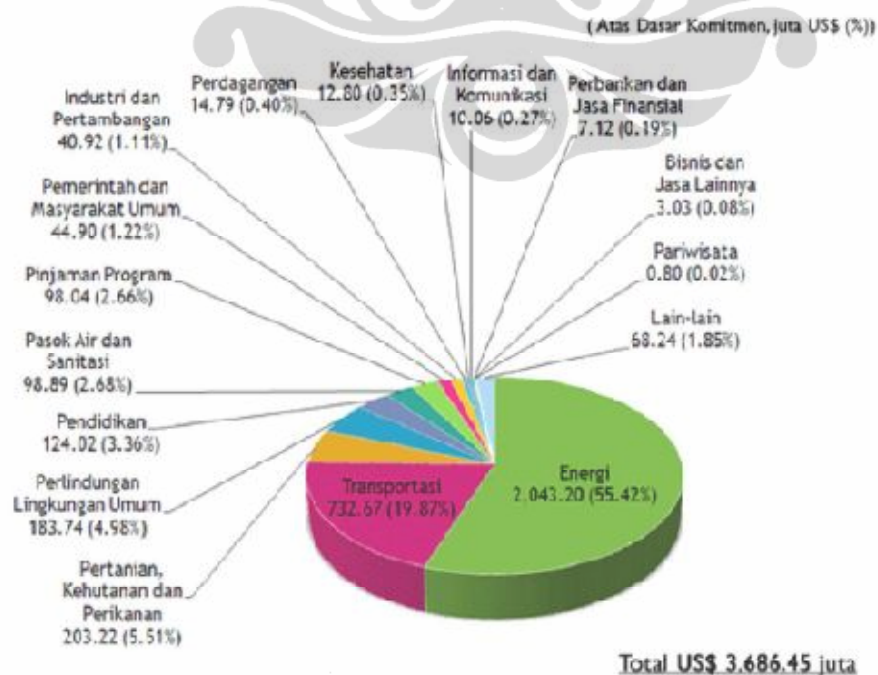
Sumber: Google Public Data; World Bank, World Development Indicators.

Sejak tahun 1960, GDP Jepang mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai US\$5.248 triliun pada tahun 1995. Setelah itu, GDP Jepang mengalami perubahan radikal dan sempat mencapai titik terendah di US\$3.857 triliun pada tahun 1998. Setelah itu, perekonomian Jepang sedikit demi sedikit pulih hingga dapat menyentuh US\$5.068 triliun di akhir tahun 2009.

Keberhasilan Jepang untuk bangkit di bidang ekonomi setelah kekalahan pada Perang Dunia II, telah memberinya citra positif di negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia (Nye, 2004). Salah satu ekonom Malaysia dalam Nye menyebutkan, *“Japan’s experience of rebuilding after the war, the way it got workers and management to cooperate and got the economy to grow in leaps and bounds, seems very Asian to us. It has much more relevance to our society than the experience of the West”* (2004, 84).

Selain itu, Jepang juga telah banyak memberi bantuan pada Indonesia. Selama tahun 2009 saja, jumlah bantuan Jepang telah mencapai 113,94 miliar Yen (RCA FM, 2010). Bantuan ODA yang didapat Indonesia dari Jepang selama tahun 2002-2005 dijabarkan dalam diagram berikut, yang diambil dari situs Official Development Assistance Jepang yang dirilis oleh Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia.

**Diagram 2.1 Bantuan ODA Jepang di Indonesia Tahun 2002-2005**



Catatan:

1. “Total tidak termasuk bantuan pembayaran utang (136,69 juta US\$) dan bantuan darurat (2.313,87 juta US\$).”
2. “Kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.”
3. “Lain-lain termasuk infrastruktur sosial lainnya, dan yang tidak tercakup.” (ODA)

Bantuan-bantuan ini telah membangun citra ‘kaya’, dan tentunya citra Jepang sebagai negara maju di kalangan rakyat Indonesia. Hal lain yang juga mendukung citra ‘kaya’ dan ‘maju’ ini adalah banyaknya perusahaan-perusahaan Jepang yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia, seperti Astra Internasional yang mencakup Toyota dan Honda, Sony, dll. Perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Astra Internasional memiliki enam bidang usaha, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, teknologi informasi dan infrastruktur. Pegawai Grup Astra mencapai 116.867 orang yang tersebar di 130 anak perusahaan dan afiliasi (Kholidah, 2008).

## **2.5 Jepang Sebagai Negara Berteknologi Maju**

Dalam bidang teknologi, Jepang juga memimpin. Jepang mulai mengadopsi teknologi barat pada periode 1850-1914. Setelah Commodore Matthew Perry datang dan ‘membuka’ Jepang. Uchida menyebutkan, Jepang mengalami dua perubahan besar pada masa ini. Pertama, lengsernya pemerintahan Tokugawa Shogun, dan digantikan oleh Kaisar Meiji. Perubahan besar kedua adalah masuknya pengetahuan dan mesin barat, hingga memacu perkembangan teknologi di Jepang. Pemerintah yang baru meneruskan kebijakan pemerintah lama dalam menghadapi barat: mempekerjakan insinyur-insinyur dari luar negeri, dan mengimpor mesin dalam jumlah besar pada bisnis-bisnis milik pemerintah.

Kronologi perkembangan teknologi Jepang adalah sebagai berikut.

- 1868 – Pengenalan metode Barat pada pertambangan
- 1869 – Mercusuar
- 1870 – Pemasangan jaringan telegraf
- 1871 – Royal Mint di Osaka
- 1872 – Jalur kereta antara Tokyo dan Yokohama, pemintalan sutra di Tomioka

- 1873 – Kementerian Pekerjaan Umum, Imperial College of Engineering
- 1876 – Tempat pembuatan bir di Sapporo
- 1878 – Desain pelabuhan
- 1879 – Pemintalan wol di Senju
- 1880 – Kantor Percetakan Negara
- 1881 – Pemintalan kapas di Aichi
- 1882 – Pabrik pembuatan besi dan bubuk besi di pangkalan angkatan laut (Uchida, 1995, 38).

Jepang tidak semerta-merta menyerap teknologi barat. Ketika pertama kali melihat kapal perang Amerika, mereka amat ketakutan dan menyebutnya ‘*Kurofune*’, yang berarti kapal hitam. Kapal itu dilengkapi teknologi canggih Amerika. “*It embodied steam engine, big guns and iron structure, symbolizing the western superiority in power, arms, metallurgy and transportation, which were principal achievements of the Industrial Revolution in western Europe and which made the major European countries and the United States industrial as well as military power in the world*” (Uchida, 1995, 39). Melihat perbedaan ini, para pemimpin Jepang menyadari kekurangan mereka dan berusaha untuk mengadopsi elemen-elemen teknologi ini dengan mengimpor mesin dan mempelajari cara kerjanya, dan mereka berhasil (Uchida, 1995).

Para pemimpin memperkenalkan sistem sosial barat, termasuk parlemen, bank, asuransi, *joint stock company*, *civil and commercial code*, angkatan darat dan angkatan laut, alat-alat modern untuk komunikasi nasional dan internasional, yang kesemuanya adalah hasil pengembangan di zaman Revolusi Industri Eropa. Pada tahun 1875, pemerintah Jepang mempekerjakan 250 orang insinyur dari luar negeri, atau ‘*Oyatoi Gaijin*’. Sebagian besar mereka berasal dari Inggris. Beberapa insinyur yang memiliki kedudukan tinggi, dibayar sama tingginya dengan pegawai kementerian.

Meskipun pemerintah Jepang mengawali bisnis dengan teknologi barat ini, pada tahun 1980, sebagian besar dijual ke sektor swasta, kecuali fasilitas militer dan komunikasi. Pada saat itu, perusahaan swasta sedang berkembang pada bidang navigasi, keuangan, dan industri kapas. Sejak saat inilah, Jepang menjadi negara kapitalis yang bergantung pada ekonomi pasar.

Setelah para insinyur dari luar negeri tersebut kembali ke negara asalnya, posisi mereka digantikan oleh para insinyur dalam negeri, dan merekalah yang memimpin industrialisasi di perusahaan pemerintah dan swasta (Uchida, 1995). *“The rise of modern engineers capable of realizing western-born technology in this country is one of the most important factor in the success of Japanese industrialization”* (Uchida, 1995, 41).

Pemerintah Jepang kemudian membentuk sistem pendidikan teknik. Tahun 1873, didirikan The Imperial College of Engineering dengan sebagian besar pengajar berasal dari Inggris. Kampus inilah yang memiliki jurusan teknik elektronika di dunia. Lulusan-lulusannya bekerja untuk pemerintah, meneruskan pekerjaan-pekerjaan para Oyatoi Gaijin. Kampus ini menjadi Department of Technology, bagian dari Tokyo Imperial University, pada tahun 1886. Pada tahun 1884, pemerintah Jepang mendirikan institut teknologi lainnya, yang dikenal dengan nama Technical High School. Sekolah ini sekarang diberi nama baru, yaitu *Tokyo Institute of Technology*, *“one of the largest center of engineering education and research in the world”* (Uchida, 1995, 42).

Uchida menemukan bahwa pada tahun 1900, Jepang memiliki 860 insinyur lulusan universitas dan 650 insinyur lulusan SMA. Sejak saat itu, jumlah departemen universitas dan SMA meningkat, dengan total lulusan mencapai 500 orang pada tahun 1910 dan 14000 pada tahun 1920 (Uchida, 1995). Sebagian besar lulusan universitas bekerja untuk pemerintah dan di bisnis *zaibatsu*, dan lulusan SMA bekerja di perusahaan swasta.

Perkembangan teknologi ini membantu perbaikan sistem transportasi. Pada zaman Edo, orang-orang masih berjalan kaki atau naik *kago*, seperti becak tanpa roda yang didukung oleh dua pria, dan barang-barang dibawa dengan kuda. Tahun 1869, Pemerintah mempekerjakan 100 insinyur asing, pengendara, dan pekerja terkait lainnya untuk membangun rel kereta api dari Tokyo ke Yokohama. Para pekerja asing tersebut menilai insinyur-insinyur lokal amat potensial dan serius dalam bekerja, dan pada tahun 1880, para insinyur lokal ini telah dapat menggantikan para insinyur asing yang kembali ke negaranya. Pada tahun 1900, jalur Tokyo-Kobe sejauh 600 km selesai dibuat, dan kereta mulai beroperasi.



Perkembangan yang sama juga terjadi di bidang pertambangan dan industri tekstil, dan juga alat-alat militer.



**Gambar 2.1 Kago**

Sumber: [http://www.printsofjapan.com/Index\\_Glossary\\_J\\_thru\\_Kakuregasa.htm](http://www.printsofjapan.com/Index_Glossary_J_thru_Kakuregasa.htm)

Perkembangan teknologi juga dicapai Jepang dalam bidang elektronik. Tahun 1888, pusat penghasil tenaga listrik pertama dibangun. *“In 1891 hydroelectric supply started in Kyoto, and by the end of the century high voltage and long distance power transmission began”* (Uchida, 1995, 49). Perkembangan ini tidak tertinggal jauh dari negara-negara Eropa dan Amerika. Tahun 1914, total tenaga listrik yang diproduksi mencapai 1555 kwh. Jumlah pusat penghasil tenaga listrik bertambah hingga mencapai 578 buah, dan kapasitas setiap pusat dapat mencapai 700 ribu kW.

Di tahun-tahun berikutnya, Jepang menghasilkan lebih banyak lulusan teknik yang bekerja di berbagai sektor. *“The statistical trend suggests that the economic activity in private industries more and more relied upon the school-educated engineers and new industries owed in particular to their knowledge and ability”* (Uchida, 1995, 52). Beberapa dari para insinyur ini membangun bisnis sendiri atau mengelola divisi pembuatan kapal atau pertambangan. Ayukawa Gisuke, pendiri Nissan Grup, adalah salah satu dari insinyur yang menjadi pengusaha.

Perkembangan pendidikan teknik juga memacu perkembangan metode pengajaran. Hingga awal abad ke-20, para dosen masih menggunakan materi dari Eropa. Para murid belajar dengan alat yang sederhana dan mempelajari prakteknya saat bekerja di pertambangan atau pabrik. Beberapa profesor yang belajar mengenai penelitian di Eropa berpendapat bahwa gelar doktor harus diberikan pada orang-orang yang memiliki “*originality of work in terms of academic research.*” (Uchida, 1995, 53). Inilah yang kemudian memacu berkembangnya penelitian di bidang teknik di Jepang.

Penelitian-penelitian ini kemudian memicu banyaknya penemuan pada tahun 1910 hingga 1940, yang didukung oleh pembaruan sistem paten. Penemuan penting pada tahun-tahun tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penemuan Penting Jepang Tahun 1910-1940**

TAHUN	TEMUAN	PENEMU	ORGANISASI
1912	TYK telepon nirkable	Torigata &c.	Kementerian Komunikasi
1913	Pompa sentrifugal	Inokichi	Tokyo University
1914	Mesin ketik bahasa Jepang	Sugimoto	
1916	Besi magnet permanen	Honda	Tohoku University
1917	Timah baterai	Shimazu	
1922	Vitamin A	Takahashi	Riken
1923	Lampu dengan kaca yang dibekukan <i>Alumite</i>	Fuwa Kujirai	Tokyo Denki Co. Riken
1924	Alat tenun otomatis <i>Photo typesetting machine</i> Antena Yagi	Toyoda Ishii Yagi	Tohoku University Tohoku University
1927	Tuba magnet Transmitter foto	Okabe Niwa	Tohoku University NEC Co.
1929	Mesin MS Diesel Mesin hitung	Shimizu Ohki	Mitshubishi Shipbuilding
1931	Besi magnet MK	Mishima	Tokyo University
1935	<i>Super high draft spinning</i>	Honda	

1936	Duralmin super Improved Cu-rayon spinning	Kitahara Munakata	Sumitomo Metal Co. Asahi Bemberg Co.
1939	Kamera fokus belakang Serat polyvinylacetal idem.	Mamiya Yazawa Sakurada &c.	Kanebo Co. Kyoto University

(Uchida, 1995, 55-56)

Selama itu, Jepang selalu mengimpor mesin dari luar negeri. Para pembuat mesin di dalam negeri berusaha untuk menggantikan mesin-mesin tersebut dengan mesin buatan sendiri. Mereka berusaha untuk terus memperbaiki performa, kapasitas, durabilitas, dan biaya pembuatan produk mereka hingga setingkat dengan mesin-mesin yang diimpor tersebut. Tahun 1912, National Railway “*established the principle of domestic production of equipment*” (Uchida, 1995, 53), dan pada tahun 1920, National Railway memesan semuanya dari produsen lokal.

Jepang juga mengembangkan teknologi kimianya. Pada tahun 1930, Jepang menjadi salah satu pemasok terbesar dari bahan-bahan kimia yang diproduksi besar-besaran: *nitrogen fertilizer* dan *rayon fiber* (Uchida, 1995). Para lulusan di bidang ini juga meningkat. Ketika muncul larangan untuk bekerja sebagai ahli kimia, mereka bekerja sebagai pengajar dan penyelidik di organisasi-organisasi pemerintah.

Selama masa Perang Dunia II, Jepang menyadari kekurangan-kekurangan teknologinya. Meskipun sudah dapat memproduksi pesawat tempur, tetapi disain yang rumit membuat ahli-ahli Jepang belum dapat memproduksi secepat ahli-ahli Amerika, sehingga tidak dapat segera mengganti yang hilang. Perbedaan besar juga terlihat pada teknologi radar, sonar, pesawat jet, roket dan bom nuklir. Uchida berpendapat, kemenangan Amerika dicapai karena kemajuan teknologinya melebihi Jepang.

Setelah perang, Jepang benar-benar hancur sebagai akibat serangan nuklir, dan kesengsaraan yang diderita oleh semua kota dan hancurnya seluruh industri. Meskipun demikian, “*in spite of the miserable fresh start, economic recovery of Japan (and Germany) was very quick, for the postwar reform forced by the enemy*

*was not always unhappy for the Japanese nation, but it laid a new course of technical development*" (Uchida, 1995, 63). Jumlah perusahaan baru semakin bertambah dan mereka bersaing di pengembangan teknis.

Sepuluh tahun setelah 1945 adalah saat yang berat untuk industri Jepang. Mereka harus membangun kembali peralatan-peralatan yang tersisa dan memproduksi barang untuk pasar yang tidak jelas. Demo serikat pekerja mengancam hampir seluruh industri.

Setelah kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang terpacu untuk meningkatkan industrinya kembali. Mereka mencari informasi mengenai teknologi informasi asing, yang tidak dimilikinya pada masa perang. Para insinyur terbaik dikirim ke Amerika untuk mencari teknologi terbaik dan meningkatkan kapasitasnya setelah kembali ke Jepang. Para manajer juga ke luar negeri untuk mencari pemilik paten dan mendapatkan izin untuk menggunakannya.

Pada sekitar tahun 1950-an, banyak masuk teknologi-teknologi baru dari barat dan menandatangani banyak perjanjian paten. Pada waktu itu, teknologi penting yang diperkenalkan pada industri dasar adalah sebagai berikut.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) Besi           | Konverter LD; Pabrik pengolahan potongan besi  |
| (2) Perkapalan     | <i>Automatic welding</i> ; Konstruksi blok   |
| (3) Otomobil       | Teknik produksi; Shell mould   |
| (4) Tenaga listrik | Pembangkit listrik tenaga uap skala besar  |
| (5) Elektronik     | TV; Transistor   |
| (6) Petroleum      | Pemecahan dan pembaharuan katalis  |
| (7) Kimia          | Petrokimia; Plastik; Karet sintetis; Serat sintetis; Deterjen sintetis; Antibiotik (Uchida, 1995, 64). |

Semua teknologi ini digunakan di hampir semua perusahaan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Jepang menjadi lebih modern daripada negara-negara lain. Penggunaan paten telah membantu industri Jepang. Namun, ada juga perusahaan yang berkompetisi dengan teknologi temuannya.

Tahun 1950, produk-produk Jepang kembali meramaikan pasar dunia. Industri pertama yang mengeksplor hasil produksinya adalah industri tekstil, yang sudah memiliki pasar sebelum perang. Dengan teknologi yang didapatnya dari Amerika, industri kapas Jepang kembali menguasai pasar dalam harga dan

kualitas. Industri perkapalan yang kehilangan pasarnya sebelum perang telah pulih dengan cepat. Sebagian besar pemilik kapal dari Yunani memesan kapalnya dari Jepang, dan ini langsung membangkitkan industri ini lagi.

Jepang mengalihkan sumber energinya dari energi air dan batu bara ke energi minyak pada tahun 1960. Sebagai akibatnya, pada tahun 1970 perusahaan industri pertambangan banyak yang ditutup dan banyak orang jadi kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, kemajuan berlangsung di bidang industri. Selama 1950-an, beberapa misi bisnis diberangkatkan dengan tujuan untuk mencari model produktivitas tinggi, mempelajari manajemen pabrik, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metode-metodenya dalam desain dan pengawasan produksi mereka sendiri (Uchida, 1995). Sebagai hasilnya, pada tahun 1960, industri mesin jahit, jam tangan dan kamera memperkenalkan *belt conveyor*, ban berjalan, yang membantu produksi dalam jumlah besar di pabrik. Dalam waktu singkat, mereka dapat dijual dengan harga murah dan diekspor ke seluruh dunia.

Setelah perang, pendapatan antar-negara lebih terbagi rata. Hal ini membuka pasar besar yang potensial untuk berbagai produk elektrik rumah tangga yang diproduksi besar-besaran, seperti mesin cuci, kulkas, pembersih ruangan, penyejuk ruangan, radio, TV set, audio set, *tape recorder*, dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat listrik yang awalnya hanya memproduksi telepon, generator atau radio set memperbanyak jenis produk yang diproduksinya ke jenis-jenis di atas. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Matsushita, NEC, Sharp, Sanyo, dan Sony. Mereka merakit barang-barang dengan komponen-komponen standar yang dipasok oleh para pembuat suku cadang. Laboratorium NHK mengembangkan sistem penyiaran televisi sendiri, dan Kementerian Komunikasi menetapkan untuk menggunakan sistem NTSC yang berasal dari Amerika atas dasar fasilitas yang tersedia.

Sebuah pabrik produksi massal memerlukan manajemen pekerja yang baik, selain penggantian mesin. Untuk menjaga kualitas, para produsen memperkenalkan metode *Quality Control*, yang memungkinkan untuk menjaga kualitas barang dan juga mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi

segala macam *waste* dan mengakumulasi perbaikan-perbaikan kecil di pabrik (Uchida, 1995).

Produksi masal juga terjadi di industri makanan. Mereka mengembangkan berbagai macam produk yang didukung oleh perkembangan industri kemasan makanan. “*Plastic packaging material for food not only substituted paper, glass or tin can but also they helped the birth of new food*” (Uchida, 1995, 69). Kemasan plastik menghindarkan makanan dari udara, air, jamur, dan bakteri, sehingga memungkinkan untuk memproduksi makanan matang atau setengah matang dengan aman hingga sampai pada konsumen. Misalnya dalam produksi mi instan. Tahun 1958, ditemukan cara untuk memasak *Lahmen* (mi China) terus menerus dalam minyak panas dan dikemas di atas *belt conveyor*. Produk ini dinamai ‘*instant lahmen*’ — mi instan, yang dapat dikonsumsi hanya dengan menuangkan air panas. Tahun 1970, pabrik tersebut dapat memproduksi dua juta pak setiap harinya, dan teknologi ini ditransfer ke negara-negara Asia Tenggara.

Perkembangan menarik juga terjadi di sistem transportasi. Sejak tahun 1930, National Railroad telah merencanakan untuk membangun jalur kereta super cepat antara dua pusat ekonomi, Tokyo dan Osaka. Setelah perang, mereka meneruskan rencana ini dengan mempekerjakan insinyur aeronotik di laboratorium dan setelah satu tahun, Shinkansen beroperasi pertama kali di tahun 1964, dengan kecepatan mencapai 230 km/jam, paling cepat di dunia saat itu. Perkembangan maskapai penerbangan nasional terpacu dengan digunakannya pesawat jet Amerika: Boeing. Industri otomobil berkembang dengan membeli ilmu dari perusahaan-perusahaan Eropa dan membuat mobil dengan tipe yang sama. Tahun 1955, Nissan dan Toyota berhasil mendesain dan memproduksi mobil-mobil produksi masal yang pertama.



**Gambar 2.2 Shinkansen**

Sumber: <http://thomasthinkengine.wordpress.com/2010/03/18/you-are-now-boarding-the-singapore-line-mind-the-gap/>

Sejak tahun 1970, teknologi Jepang mulai meningkat. Saat itu, Jepang “*exported electrical appliances, synthetic fiber, ship, camera and watch more than any country. Export of Steel, chemicals motorcar, machine tool also increased*” (Uchida, 1995, 73). Hal ini berarti teknologi Jepang termasuk kompetitif dalam harga dan kualitas. Waktu itu, industri Jepang masih dalam masa perkenalan dengan teknologi Amerika dan Eropa. Jepang mengeksport teknologi besi dan fiber ke Eropa.

Jepang mengembangkan teknologi nuklirnya untuk keperluan bukan perang, karena masih ada perasaan anti nuklir sebagai akibat bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Informasi publik dan kontrol pemerintah juga tetap dijaga untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Berdasarkan prinsip inilah National Nuclear Research Laboratory didirikan pada tahun 1955 untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik.

Perkembangan semikonduktor Jepang juga menarik. Tahun 1956 mereka berhasil memproduksi masal transistor dan mengaplikasikannya ke radio set. Tahun 1960 transistor menggantikan *vacuum tube* dari sirkuit elektronik dan Jepang menjadi produsen transistor terbesar di dunia. Tahun 1962, Sony memasarkan mikrotelevisi pertama di dunia dengan transistor silikon dan Sharp memproduksi kalkulator dengan transistor pertama di dunia. Perusahaan-

perusahaan Jepang kemudian dapat menemukan IC dan memproduksinya secara masal dengan kerja sama dengan perusahaan Amerika, Fairchild.

Perkembangan teknologi semikonduktor di Jepang dapat mengalahkan Amerika.

*During the 1970's the U.S. and Japanese semiconductor manufacturers competed against each other in multiplying integration and in improving the yield of production, and the Japanese won on the both ways. They developed 1 kilo bit memory chip in 1972, almost at the time as U.S., and by 1977 they surpassed the latter by making the world first 64 kilobit memory (Uchida, 1995, 75).*

Sejak itu, Jepang memimpin inovasi produk IC memori. Dalam industri ini, ada tiga elemen penting yang membuat Jepang berhasil. Faktor utama adalah banyaknya pekerja di bidang fisika terapan. Perkembangan pendidikan teknik telah menambah jumlah lulusan dengan cukup signifikan: 10 kali lebih banyak dari 20 tahun lalu. Mereka lulusan berbagai jurusan teknik yang sebagian besar menjadi *practical engineers*. Faktor kedua adalah industri Jepang berorientasi pada konsumen dan pasar yang besar, berbeda dengan Amerika. Faktor ketiga adalah disiplin pekerja. Untuk memproduksi IC, lingkungan harus bersih dari debu, begitu pula pekerjanya.

Perkembangan teknologi komputer Jepang ternyata tidak sebaik di bidang lainnya. Meskipun sudah mengembangkan komputer dengan teknologi sendiri, hasilnya masih jauh di belakang IBM. Tahun 1980, Jepang menjadi pasar terbesar kedua untuk komputer, setelah Amerika, karena adanya komputerisasi dalam pekerjaan dan sistem informasi.

Ketika Jepang menjadi negara industri, polusi jadi masalah. Protes masyarakat, peraturan dari pemerintah local dan pusat, perbaikan-perbaikan di proses industri dan produk membawa perkembangan pada teknologi lingkungan tahap demi tahap. *“In the 1970's air pollution by the So<sub>2</sub>, Co and NO<sub>x</sub> in the exhaust of motor car became the largest problem and strict regulation was carried out to the car makers” (Uchida, 1995, 81).*

Jepang membantu berkembangnya industrialisasi di Korea, Taiwan, Singapura, Thailan, Malaysia, Indonesia, dan area pantai China. Pemerintah Jepang memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti



dam, portal, pembangkit listrik, dan jaringan telepon di negara-negara tersebut, diikuti oleh para produsen Jepang membuat *joint venture* untuk memproduksi *consumer goods* untuk menggantikan ekspor. Di Korea dan China, para pembuat besi dari Jepang membantu dalam membuat pabrik modern yang besar. Akibat adanya kebijakan untuk menjaga mutu produk sama baiknya dengan di Jepang, maka Jepang mentransfer banyak teknologi ke negara tersebut, yang akhirnya mendorong pertumbuhan industrialisasi. Transfer teknologi ini jugalah yang membangun dan memperkuat citra Jepang sebagai negara berteknologi tinggi, selain dari sejarah panjangnya dalam mengenal dan mengembangkan teknologi.

## 2.6 Jepang dan Budaya Pop

Jepang sudah berusaha menyebarkan *soft power*-nya melalui *manga*, *anime*, serial *dorama*, *video game*, *fashion*, dan musik popnya, J-pop. Citra lain Jepang yang terdapat pada benak masyarakat Indonesia adalah *cute* dan menjunjung tinggi budayanya. Citra *cute* didapat Jepang setelah berpuluh-puluh tahun menyebarkan *manga*, komik, dan *anime*, serial kartun. Serial Doraemon dan Pokemon merupakan dua dari banyak *manga* dan *anime* Jepang yang populer di tengah-tengah anak-anak Indonesia.

*Manga* diimpor sebagai hiburan, tetapi pengaruh jalan cerita dan visualnya dapat dilihat dengan jelas di negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia (Ahmad dan Zpalanzani, 2005). *Manga* tidak hanya sukses dalam penjualan, tetapi juga dalam menyebarkan budaya Jepang, dengan “*creating devoted readers turn artists with manga-esque style storytelling*” (Ahmad dan Zpalanzani, 2005, 1). Menurut Ahmad dan Zpalanzani (2005), *manga* yang menggunakan visual untuk menceritakan suatu kisah menggunakan ikon-ikon sebagai representasi segala sesuatu, untuk mensimplifikasi visual tersebut. Simplifikasi inilah yang menjadi alat efektif untuk bercerita dalam media apapun.

Cara kerja komik adalah dengan membuat seolah-olah pembaca adalah karakter di dalamnya. Gambarannya yang tidak realistis justru membawa pembaca ingin menjadi salah satu karakternya dan masuk ke dunia imajinasinya. “*Manga’s potential in creating the tipping point enables them to be embrace and slowly influences readers from another country to create their own comics, first by*

*imitating their favourite characters before creating their own*” (Ahmad dan Zpalanzani, 2005, 9). Sama halnya dengan *manga*, *anime* juga menimbulkan keinginan yang sama. Melalui *manga*, *anime* dan *video game*, “*Japanese images dominated children’s dreams quite handily over the last five years with their mix of cuteness and power*” (Nye, 2004, 86).

Pada Januari 2007, Menteri Luar Negeri Taro Aso, dalam pidatonya di hadapan Diet (parlemen), mengatakan akan mengadopsi budaya pop Jepang sebagai alat diplomasi. Ujarnya, “*What is important is to be able to induce other countries to listen to Japan. If the use of pop culture or various sub-cultures can be useful in this process, we certainly should make the most of them*” (Lam, 2007, 351).

Kementerian Luar Negeri Jepang, MoFA, dalam situs resminya, menuliskan bahwa tujuan diplomasi budaya pop ini bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan kepercayaan pada Jepang. Diplomasi ini menggunakan budaya pop, sebagai tambahan dari budaya tradisional dan seni, sebagai alat utama diplomasi publik. “*Among young people, pop-culture, such as Manga dan Anime, has been popular worldwide in recent years*” (MoFA). Sebagai salah satu usahanya, Kementerian menyelenggarakan International Manga Award pada tahun 2007. Penghargaan ini telah memasuki tahun ketiga dan telah menerima 303 karya dari berbagai negara dan regional.

Sejak tahun 2008, Kementerian juga telah memulai proyek Anime Ambassador, dengan tujuan untuk meningkatkan ketertarikan pada Jepang melalui Anime. Bulan Maret 2008, Menteri Luar Negeri Koumura menjadikan Doraemon, salah satu karakter Anime yang sudah terkenal, sebagai Duta Anime Jepang. Pada bulan Februari 2009, pemimpin-pemimpin muda yang berprestasi di budaya pop, terutama *fashion*, dipilih untuk menjadi Trend Communicators of Japanese Pop Culture, atau Kawaii Ambassadors, untuk menjalankan publisitas.



**Gambar 2.3 Doraemon dan karakter lainnya**

Sumber: <http://whooila.184411.n3.nabble.com/5-film-kartun-yang-Paling-Lama-tayang-Di-TV-td205396.html>

Kementerian juga mendukung World Cosplay Summit (WCS) yang bertujuan “*to contribute to creation of international exchange of youth culture born in Japan through manga and anime*” (MoFA). *Cosplay* adalah kegiatan mengikuti tokoh *manga* dan *anime* dengan meniru pakaian dan aksi-aksi. Seperti proyek diplomasi kebudayaan lainnya, WCS ingin meningkatkan pengertian di antara banyak negara, termasuk Jepang, melalui *cosplay*, yang telah mendapat popularitas global pada beberapa tahun belakangan. WCS 2010 adalah tahun kedelapan dari kegiatan ini.



**Gambar 2.4 World Cosplay Summit 2010**

Sumber: <http://www.mofa.go.jp/policy/culture/exchange/pop/wcs2010.html>

Menurut Lam (2007), daya tarik budaya pop Jepang di Asia dan regional lain bukan fenomena baru. Jauh sebelum Doraemon dan Pokemon disukai banyak orang, Astro Boy, Ultraman dan Godzilla telah lebih dulu disukai oleh generasi sebelumnya. Jepang menggunakan produk-produk budaya pop ini sebagai alat *soft power*, meskipun tujuan pencipta *manga* dan *anime* tidak demikian.

*Anime* dan *manga* ini juga dinikmati oleh anak-anak di Indonesia. Mereka telah membawa citra positif dan membuat Jepang lebih disukai oleh anak-anak Indonesia. Banyak orang mempelajari bahasa Jepang bukan karena alasan ekonomi. Mereka tidak ingin menjalin bisnis dengan Jepang. Mereka mempelajarinya karena mereka tertarik pada *anime* dan *manga* (Lam, 2007).

Secara ekonomi, *anime* dan *manga* mendatangkan untung besar bagi Jepang. Berikut adalah penjualan *licensing anime* di luar Jepang di tahun 2005.

**Tabel 2.2 Penjualan *Licensing Anime* di Luar Negeri Tahun 2005**

Penjualan DVD di luar negeri	8.5
Pendapatan <i>Licensing</i>	7.7
Total	16.2 (miliar Yen)

Sumber: JETRO.

*Dorama*, sebutan orang Jepang untuk drama, adalah bentuk *soft power* Jepang lainnya. Penyebarannya tidak secepat dan selaris *anime* atau *manga*, ataupun serial drama Korea, tetapi *dorama* juga memiliki pecintanya sendiri di Asia. *Dorama* yang paling terkenal di Indonesia adalah Tokyo Love Story, yang diputar pertama kali pada tahun 1994, dan diputar ulang oleh stasiun televisi yang berbeda pada tahun 2005. Rika Akana, tokoh utama, diceritakan terlibat cinta segitiga dengan Kanji dan Satomi, cinta pertama Kanji. Rika yang amat mencintai Kanji juga berharap bahwa Kanji dapat menyayanginya sepenuh hati.

*Dorama* yang belakangan ini cukup populer adalah Ichi Rittoru no Namida (1 Litre of Tears — Satu Liter Air Mata), yang menceritakan mengenai Aya, seorang gadis yang terkena *Cerebellar Degeneration* (Ataksia). Penyakit yang mulai diderita ketika Aya masuk SMA ini membuatnya sedikit demi sedikit tidak dapat mengendalikan otot-otot di tubuhnya. Karena penyakit itu, Aya tidak dapat

lulus dari SMA negeri, sekolah impiannya, dia harus pindah ke Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melatih dirinya agar tetap mandiri. *Dorama* ini didasarkan pada kisah hidup Aya Kito, yang menderita penyakit yang sama, dan meninggal di usia 23 tahun, setelah berjuang melawan penyakitnya selama lebih dari tujuh tahun. Alur cerita dibuat berdasarkan keterangan dari ibu Aya dan buku harian yang selalu ditulis Aya.



**Gambar 2.5 Pemeran-pemeran Ichi Rittoru No Namida, dengan Pemeran Aya Kito Duduk di Kursi Roda**

Sumber: <http://tomapink.blog89.fc2.com/blog-category-4.html>

J-Pop, atau *Japanese pop music*, adalah jenis musik pop yang lahir di Jepang pada sekitar tahun 1950-an. J-pop menurut Garland dalam Chiu adalah “*part of Japanese popular cultural movement that began with influx of American movies and popular music into Japan during the post-World War II era.*” (Chiu, 2005, 1). Jenis musik ini berkembang pada saat orang Jepang meniru dan mengadaptasi musik-musik pop barat pada tahun 1950-an. Saat itu, orang-orang Jepang mengagumi banyak musik pop Amerika dan mengimitasi mereka dengan menyanyikannya dalam bahasa Jepang (Chiu, 2005). Banyak band barat yang mengadakan tur ke Jepang dan ini menginspirasi anak-anak muda Jepang untuk membuat musiknya sendiri, dengan menggunakan gitar elektrik dan drum. Pembentukan band-band ini dikenal dengan sebutan Elec Boom. Dengan

banyaknya anak muda yang tergabung dalam band dan menyanyi seperti the Beatles, grup-grup rock komersial terdiri dari “*four to seven long-haired male singers wearing identical clothes*” (Fujie dalam Chiu, 2005, 2). Gerakan ini dikenal dengan nama gerakan Group Sounds, yang dicirikan dengan gitar elektrik, drum, irama yang cepat, harmonisasi vokal, dan ide musik dari anak muda untuk anak muda. Seiring waktu, J-Pop memiliki perpaduan antara pop Amerika dan musik tradisional Jepang. Instrumen yang dipakai dalam J-pop adalah gitar elektrik, drum, dan *synthesizer*. Lirikanya bertemakan seputar masa muda, cinta dan persahabatan, dengan artis-artis yang berusia belasan hingga 20-an.

J-pop adalah bagian penting dalam musik populer Jepang kontemporer, terutama karena adanya kegilaan yang ditimbulkan oleh para artisnya, meskipun banyak artisnya yang tidak dapat menyanyi ataupun menulis lagu sendiri. Banyak idola Jepang yang ‘dimaafkan’ karena penampilan mereka, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai. Gerakan tarian dan kepribadian yang ‘baik’ juga komponen yang membuat mereka dimaafkan atas kekurangan mereka. *Boy bands* jadi amat terkenal sehingga sering diminta menjadi pembawa acara televisi dan radio, berperan dalam drama, dan bintang iklan.

Bukan hanya *boy bands* saja yang terkenal di Jpop, tetapi juga kelompok penyanyi perempuan yang *cute* dan pintar menari tetapi tidak memiliki bakat musik yang menonjol. Kekuatan di balik gerakan grup pop ini adalah “*the “artistic” production companies that conducted talent searches for the next teen star and determined the fate of that star by giving her an image, writing her songs, choreographed her dances and marketing her*” (Chiu, 2005, 2). Karena ketenaran grup-grup idola ini hanya bertahan selama dua hingga tiga tahun, maka perusahaan produksi berusaha untuk memproduksi banyak generasi idola dan *girl bands*. Sebagai akibatnya, banyak anak muda yang berusaha mengikuti pencarian bakat agar dapat menjadi bintang remaja berikutnya. Oleh sebab itu, dibuatlah acara televisi “*Star is Born*” untuk mencari seorang bintang baru di antara anak-anak muda Jepang.

*Girl bands* tampaknya lebih potensial untuk diterima audiens, karena mereka *cute* dan dekat dengan fans. Pertama, “*the Japanese men liked the cute female idols whose sweet and generous character embodies that of an ideal wife*

*and mother*” (Chiu, 2005, 3). Citra *cute* dan muda amat dihargai di masyarakat Jepang sejak dulu. Kedua, “*the Japanese women looked to the female idols for contemporary fashion and lifestyle trends*” (Chiu, 2005, 3). Idola sering dijadikan model untuk majalah *fashion* dan remaja, dan sering dijadikan juru bicara untuk kosmetik, merek-merek pakaian, dan penasihat cinta. Terakhir, “*as the most enthusiastic fans, adolescents looked up to their idols for companionship, advice and fashion trends*” (Chiu, 2005, 3). Hubungan antara idola dan fansnya sangat dekat, terutama karena kesamaan usia yang membantu mereka merasa terhubung dan tumbuh bersama serta menjadi dewasa bersama.

Dalam menampilkan bintangnya, perusahaan produksi membuat mereka sebagai orang-orang yang berasal dari orang biasa yang beruntung dapat menjadi bintang. Aoyagi dalam Chui berpendapat sebagai berikut.

*Modesty and deference to the social norm are highly valued in Asian society and are best summed up in the following idiom: “the nail that sticks out gets hammered down.” In following the traditional values of Asian society, Japanese idols are often depicted as the typical girl or boy next door chosen to be lucky stars and to represent their generation* (Chui, 2005, 4).

Dalam menjaga citra tersebut, idola-idola tersebut menjaga kedekatannya dengan fans. Misalnya, dengan mengadakan jumpa fans, menjawab surat-surat fans, dan memiliki diari *online*. Fans akan merasa idolanya ada bersama mereka dan akan selalu tersenyum dan tidak akan mengecewakan mereka. Idola juga harus *cute*. *Cuteness* adalah daya tarik bagi masyarakat yang menjunjung tinggi kemudaan dan kepolosan. Untuk memperlihatkan bahwa mereka *cute*, idola harus selalu tersenyum, menyanyi, akting, dan berbicara dengan cara yang manis, lembut, dan menawan (Fujie dalam Chiu, 2005), sehingga fans merasa perlu untuk melindungi mereka dan membantu mereka menjaga kepolosannya dengan menyerukan nama mereka di kontes menyanyi, konser, ataupun acara pemberian tanda tangan. Dengan naiknya popularitas idola, strategi marketing dengan memperkenalkan idola-idola yang amat *cute* dan polos telah menjadi standar di dunia J-pop.

Diplomasi Jepang dengan menggunakan budaya pop telah berlangsung lama. Diplomasi ini sempat diragukan keefektifannya, tetapi banyak orang ingin mempelajari bahasa Jepang karena tertarik pada *manga* dan *anime* ini. Diplomasi budaya pop Jepang tidak terbatas pada *manga* dan *anime*, tetapi juga *cosplay*, *dorama*, dan juga musik J-pop.

